

ANALISIS PEMBINAAN HUKUM BAGI PRAJURIT MELALUI PEMBERDAYAAN BADAN PEMBINAAN HUKUM TNI DALAM RANGKA MENINGKATKAN PROFESIONALISME PRAJURIT**Jajang Kurniawan, M. Ali Ridho, Rokhmat**

Sekolah Tinggi Hukum Militer, Indonesia

Email: jajangkurniawan996@gmail.com

Abstrak

Badan Pembinaan Hukum TNI atau Babinkum TNI adalah badan pelaksana pusat pada tingkat markas besar TNI yang berkedudukan langsung dibawah Panglima TNI. Salah satu tugas Babinkum adalah memberikan penyuluhan hukum kepada para prajurit di satuan yang terkait dalam lingkungan TNI agar tidak melakukan pelanggaran. Menyadari pentingnya dalam menjaga profesionalisme prajurit TNI, maka dalam upaya mengantisipasi terjadinya pelanggaran disiplin yang dapat mencoreng citra institusi TNI baik ringan maupun berat, memerlukan suatu langkah strategis dengan menggunakan konsepsi kebijakan yang diarahkan guna meningkatnya profesionalisme prajurit TNI yaitu melalui pemberdayaan Badan Pembinaan Hukum TNI yang dilakukan dalam kegiatan pembinaan hukum. Metode yang digunakan yakni metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan studi pustaka. Langkah-langkah dalam menganalisa data penelitian ini melalui tiga alur kegiatan, meliputi; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pembinaan Hukum TNI (Babinkum TNI) telah melakukan berbagai upaya yang terstruktur dan berfokus pada penegakan hukum, pendidikan hukum, serta pembinaan etika militer. dalam rangka meningkatkan profesionalisme prajurit. Upaya yang dilakukan oleh Babinkum TNI ini dirancang untuk memperkuat kedisiplinan, pemahaman hukum, dan moralitas prajurit, yang pada akhirnya akan meningkatkan profesionalisme mereka dalam menjalankan tugas pertahanan dan keamanan negara. Namun demikian masih terdapat tantangan khususnya pada ketersediaan sumber daya (SDM dan anggaran), perubahan peraturan dan kebijakan dan masih terdapat kelemahan pada kesadaran dan pengetahuan hukum prajurit. Selain itu kerjasama yang sudah terjalin dengan lembaga hukum dan stakeholders internal TNI lainnya perlu diperluas seperti LSM atau akademisi untuk mendapatkan perspektif tambahan dan memperkaya materi hukum yang lebih luas.

Kata kunci: Profesionalisme, Pembinaan hukum, **Profesionalisme Prajurit****Abstract**

The TNI Legal Development Agency or Babinkum TNI is a central implementing agency at the TNI headquarters level which is directly under the TNI Commander. One of Babinkum's tasks is to provide legal counseling to soldiers in related units within the TNI so as not to commit violations. Realizing the importance of maintaining the professionalism of TNI soldiers, in an effort to anticipate the occurrence of disciplinary

How to cite:

Jajang Kurniawan, M. Ali Ridho, Rokhmat (2024) Analisis Pembinaan Hukum Bagi Prajurit Melalui Pemberdayaan Badan Pembinaan Hukum Tni Dalam Rangka Meningkatkan Profesionalisme Prajurit, (06) 10

E-ISSN:[2684-883X](https://doi.org/10.26848/2684-883X)

violations that can tarnish the image of the TNI institution both mild and severe, requires a strategic step by using a policy conception directed at increasing the professionalism of TNI soldiers, namely through empowering the TNI Legal Development Agency carried out in legal coaching activities. The method used is descriptive qualitative method by using in-depth interviews, observation, and literature study. The steps in analyzing the data of this research through three streams of activities, include; data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that the TNI Legal Development Agency (Babinkum TNI) has made various efforts that are structured and focused on law enforcement, legal education, and fostering military ethics. in order to improve the professionalism of soldiers. The efforts made by Babinkum TNI are designed to strengthen the discipline, legal understanding, and morality of soldiers, which in turn will increase their professionalism in carrying out national defense and security duties. However, there are still challenges, especially in the availability of resources (human resources and budget), changes in regulations and policies and there are still weaknesses in soldiers' awareness and legal knowledge. In addition, the cooperation that has been established with legal institutions and other internal TNI stakeholders needs to be expanded such as NGOs or academics to gain additional perspectives and enrich broader legal materials.

Keywords: *Professionalism, Legal coaching*

PENDAHULUAN

Badan Pembinaan Hukum TNI atau Babinkum TNI adalah badan pelaksana pusat pada tingkat markas besar TNI yang berkedudukan langsung dibawah Panglima TNI yang memiliki tugas pokok untuk memberikan bantuan hukum, dukungan hukum dan perundang-undangan kepada Kepala Staf Umum TNI, baik itu permasalahan atau apapun yang berkaitan dengan urusan hukum dan perundang-undangan (Ismiyati, 2019). Selain itu, Badan Pembinaan Hukum (Babinkum) juga memberikan penyuluhan hukum kepada para prajurit di satuan yang terkait dalam lingkungan TNI agar tidak melakukan pelanggaran. Babinkum juga melakukan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan kebijaksanaan pengorganisasian, pembinaan satuan dan personel, pembuatan doktrin buku petunjuk hukum, penelitian dan pengembangan, tradisi korps hukum dalam rangka mewujudkan kemampuan prajurit dan satuan Hukum TNI (Rahayu & Sutama, 2016). Pembinaan pendidikan dan latihan yang meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan perencanaan, pengendalian dan pengawasan pendidikan dan pelatihan kecabangan hukum serta pendidikan tinggi ilmu hukum bagi personel TNI. Dukungan hukum yang diberikan oleh Babinkum yaitu menyelenggarakan kegiatan berkenaan dengan dukungan hukum kepada satuan dan prajurit TNI dalam rangka pembinaan kekuatan dan penggunaan kekuatan (LUBIS, 2022). Bantuan hukum yang diberikan oleh Babinkum seperti menyelenggarakan kegiatan berkenaan dengan penyelesaian perkara di dalam dan atau di luar pengadilan kepada satuan, prajurit dan PNS beserta keluarganya. Pembinaan Perundang-undangan yang diberikan oleh Babinkum dengan menyelenggarakan kegiatan berkenaan dengan kompilasi hukum, penelitian dan pengkajian peraturan perundang-undangan,

pemeliharaan dokumen serta penyiapan peraturan yang terkait dan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas TNI (Hutomo & Soge, 2021).

Namun demikian sejalan dengan perkembangan Tren kasus pelanggaran disiplin prajurit TNI cukup memprihatinkan, karena meningkat sekitar 50,6% dibandingkan pada tahun sebelumnya. Sementara untuk pelanggaran pidana desersi, kasus yang tercatat juga meningkat hingga sebesar 13,5% hingga akhir tahun 2022. Fakta tersebut dipaparkan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, ketika membuka Operasi Penegakan Ketertiban (Opsgaktib) dan Yustisi Polisi Militer TNI 2023 (Assagaf, 2023).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer pada Pasal 8 disebutkan bahwa jenis pelanggaran hukum disiplin militer terdiri atas: “segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata tertib militer dan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya”. Adapun pelanggaran disiplin militer yang sifatnya berat meliputi: penyalahgunaan senjata api (senpi) serta amunisi dan bahan peledak (Muhandak), penyalahgunaan narkoba baik sebagai pengedar maupun pengguna, desersi atau meninggalkan kesatuan selama lebih dari 30 hari berturut-turut dan insubordinasi atau melawan atasan, perkelahian baik perorangan maupun kelompok dengan rakyat, antar anggota TNI dan Polri, pelanggaran susila terutama dengan keluarga TNI, penipuan, perampokan dan pencurian serta perjudian, backing, illegal logging dan illegal mining (Ramadhan & Heniarti, 2022).

Menyadari pentingnya dalam menjaga profesionalisme prajurit TNI, maka dalam upaya mengantisipasi terjadinya pelanggaran disiplin yang dapat mencoreng citra institusi TNI baik ringan maupun berat (Ramadantica, 2024), memerlukan suatu langkah strategis dengan menggunakan konsepsi kebijakan yang diarahkan guna meningkatnya profesionalisme prajurit TNI yaitu melalui pemberdayaan Badan Pembinaan Hukum TNI yang dilakukan dalam kegiatan pembinaan hukum. Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan penelitian ini untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum TNI Dalam Meningkatkan Profesionalisme Prajurit. Untuk menganalisis kerja sama lintas sektoral yang dilakukan antara Badan Pembinaan Hukum TNI dengan lembaga hukum dan stakeholders internal TNI lainnya dalam meningkatkan profesionalisme Prajurit.

METODE PENELITIAN

Setiap penulisan ilmiah haruslah berdasarkan fakta-fakta yang objektif agar kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis normatif (Diantha & Sh, 2016). Metode yang digunakan yakni metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan studi pustaka. Langkah-langkah dalam menganalisa data penelitian ini melalui tiga alur kegiatan, meliputi Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan

mencarinya bila diperlukan (Moleong, 2017). Penyajian data, maksudnya adalah penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan, antara kategori, dan sebagainya (Danardono, 2015). Melalui penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Conclusion drawing/verification artinya penarikan kesimpulan data dalam penelitian kualitatif. Jadi setelah data direduksi, kemudian disajikan, maka tahap analisis selanjutnya adalah penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis peran Babinkum TNI dalam pembinaan hukum prajurit

Peran Badan Pembinaan Hukum (Babinkum) TNI sangat penting dalam menjaga disiplin dan integritas prajurit TNI. Babinkum TNI bertanggung jawab atas pembinaan hukum dalam lingkungan TNI, terutama dalam memastikan bahwa prajurit mematuhi hukum, peraturan militer, dan nilai-nilai etika. Babinkum TNI juga telah memainkan peran sentral dalam pembinaan hukum prajurit dengan menegakkan disiplin, memberikan edukasi hukum, serta menangani pelanggaran hukum di lingkungan militer. Disamping itu Babinkum TNI berfungsi sebagai penjaga aturan dan hukum dalam tubuh TNI, yang penting untuk menjaga kehormatan dan profesionalisme prajurit.

Analisis pentingnya pembinaan hukum bagi profesionalisme prajurit

Pembinaan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan meningkatkan profesionalisme prajurit. Profesionalisme prajurit tidak hanya dilihat dari kemampuan militer atau fisik mereka, tetapi juga dari kemampuan mematuhi hukum, kode etik, dan standar moral yang tinggi. Pembinaan hukum sangat penting dalam menjaga dan meningkatkan profesionalisme prajurit. Hukum menjadi pedoman utama dalam bertindak dengan disiplin, tanggung jawab, dan etika. Pembinaan hukum yang efektif akan membentuk prajurit yang tidak hanya tangguh secara fisik dan taktik, tetapi juga memiliki integritas moral yang kuat, sehingga mampu melaksanakan tugas dengan profesionalisme tinggi dan menjaga kehormatan institusi.

Analisis Upaya Badan Pembinaan Hukum TNI dalam meningkatkan pemahaman hukum di kalangan prajurit

Badan Pembinaan Hukum (Babinkum) TNI berperan penting dalam upaya meningkatkan pemahaman hukum di kalangan prajurit. Pemahaman hukum yang baik di kalangan prajurit sangat penting untuk menjaga kedisiplinan, integritas, dan profesionalisme prajurit, serta untuk menghindari pelanggaran hukum yang dapat merusak citra TNI. Upaya-upaya yang telah dilakukan Babinkum TNI dalam meningkatkan pemahaman hukum di kalangan prajurit menjadi langkah yang sangat penting untuk menjaga disiplin, integritas, dan profesionalisme prajurit (Satibi, 2024). Melalui penyuluhan hukum, integrasi pendidikan hukum dalam pelatihan militer, konsultasi hukum, simulasi kasus, serta evaluasi rutin, Babinkum TNI secara proaktif

memastikan bahwa prajurit memiliki pengetahuan hukum yang memadai. Upaya ini tidak hanya mencegah pelanggaran hukum, tetapi juga membentuk prajurit yang lebih bertanggung jawab dan profesional dalam menjalankan tugas-tugas militer mereka.

Analisis efektivitas program pembinaan hukum yang telah dilaksanakan oleh Babinkum TNI

Efektivitas program pembinaan hukum yang telah dilakukan Babinkum TNI dapat dinilai cukup berhasil karena terdapat peningkatan pemahaman hukum di kalangan prajurit, penurunan pelanggaran hukum, peningkatan disiplin dan profesionalisme, serta akses yang lebih luas terhadap informasi dan layanan hukum. Namun, untuk mempertahankan dan meningkatkan efektivitas program, Babinkum TNI perlu terus melakukan evaluasi berkala, memperbarui metode pembinaan, memanfaatkan teknologi modern, dan memastikan bahwa seluruh prajurit memiliki akses yang merata terhadap pembinaan hukum.

Analisis tantangan yang dihadapi Babinkum TNI dalam menjalankan pembinaan hukum

Badan Pembinaan Hukum (Babinkum) TNI menghadapi sejumlah tantangan dalam menjalankan program pembinaan hukum di lingkungan militer. Tantangan ini tidak hanya terkait dengan faktor internal organisasi militer, tetapi juga eksternal, seperti perkembangan hukum nasional dan internasional, serta dinamika operasional TNI. Lebih rinci bentuk dari tantangan tersebut adalah tantangan dalam menjalankan pembinaan hukum, termasuk kesadaran hukum yang rendah di kalangan prajurit, variasi latar belakang pendidikan, keterbatasan sumber daya, serta kompleksitas hukum nasional dan internasional. Selain itu, budaya militer yang kuat, perkembangan teknologi, dan perubahan hukum nasional juga menambah tantangan dalam memastikan bahwa semua prajurit mematuhi hukum yang berlaku. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, Babinkum TNI perlu terus melakukan inovasi dalam metode pembinaan hukum, meningkatkan pemantauan dan evaluasi, serta memperkuat integrasi teknologi dalam proses pendidikan hukum bagi prajurit.

Analisis dampak pembinaan hukum terhadap perilaku dan sikap prajurit di lapangan

Pembinaan hukum yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum (Babinkum) TNI memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku dan sikap prajurit di lapangan. Pembinaan hukum bertujuan untuk membentuk prajurit yang tidak hanya disiplin secara militer tetapi juga taat hukum, baik dalam konteks operasi militer maupun kehidupan sehari-hari. Sehingga pembinaan hukum yang telah Babinkum TNI lakukan mampu memberikan pengaruh yang sangat positif terhadap perilaku dan sikap prajurit di lapangan. Melalui pemahaman hukum yang baik, prajurit menjadi lebih taat aturan, disiplin, dan profesional dalam menjalankan tugas. Mereka juga lebih mampu mengendalikan emosi, menghindari pelanggaran hukum, dan bertindak secara etis dalam situasi yang menantang. Pada akhirnya, pembinaan hukum membantu

menciptakan prajurit yang tidak hanya kuat secara fisik dan teknis, tetapi juga memiliki integritas dan tanggung jawab yang tinggi terhadap hukum dan masyarakat yang dilayaninya.

Analisis masukan/saran untuk meningkatkan pembinaan hukum di TNI agar lebih efektif dalam meningkatkan profesionalisme prajurit

Meningkatkan efektivitas pembinaan hukum di TNI sangat penting untuk membentuk prajurit yang profesional, disiplin, dan taat hukum. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan beberapa langkah dan strategi yang dapat memperkuat pelaksanaan program pembinaan hukum (Deflijun, 2020). Untuk meningkatkan efektivitas pembinaan hukum di TNI, perlu dilakukan langkah-langkah strategis seperti penggunaan metode pembelajaran interaktif, program berkelanjutan, penguatan pemahaman hukum internasional, pelibatan ahli hukum, serta pengembangan budaya hukum yang kuat. Evaluasi dan pemantauan yang lebih baik juga diperlukan untuk memastikan bahwa pembinaan hukum memberikan dampak yang nyata terhadap profesionalisme prajurit. Integrasi teknologi dan penyederhanaan materi hukum yang relevan dengan tugas operasional juga akan mendukung tercapainya tujuan pembinaan hukum di TNI.

Analisis kebutuhan untuk pelatihan tambahan mengenai hukum bagi prajurit

Pelatihan tambahan hukum bagi prajurit TNI sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap berbagai aspek hukum yang relevan dengan operasi militer modern (Sarjito & Lelyana, 2023). Tantangan yang semakin kompleks dalam tugas operasional, baik domestik maupun internasional, menuntut prajurit untuk memiliki pemahaman hukum yang lebih mendalam dan kemampuan menerapkan hukum dalam situasi nyata. Kebutuhan pelatihan tambahan ini meliputi hukum humaniter internasional, hukum pidana militer, etika dan HAM, hukum teknologi dan siber, serta hukum operasional gabungan dengan lembaga sipil. Program pelatihan yang berkelanjutan, relevan, dan berbasis situasi lapangan akan membantu prajurit TNI menjadi lebih profesional, disiplin, dan taat hukum dalam menjalankan tugas mereka.

Analisis pengalaman pribadi atau observasi yang dibagikan terkait pembinaan hukum di TNI

Terdapat beberapa aspek penting yang bisa diungkapkan, mulai dari efektivitas program pembinaan hukum, dampak langsung terhadap perilaku prajurit, hingga tantangan yang dihadapi selama implementasi (Uksan, 2017). Pengalaman pribadi atau observasi dari responden terkait pembinaan hukum di TNI memberikan gambaran yang kaya tentang bagaimana program ini beroperasi di lapangan, serta tantangan dan manfaat yang dirasakan prajurit. Responden merasa bahwa pembinaan hukum efektif akan menyoroti pentingnya pelatihan berkelanjutan, dukungan komando, serta relevansi materi hukum dengan tugas operasional. Di sisi lain, tantangan seperti kesenjangan antara teori dan praktik, keterbatasan instruktur, dan kurangnya waktu untuk pelatihan

menunjukkan perlunya peningkatan lebih lanjut dalam program pembinaan hukum di TNI agar lebih mendukung profesionalisme dan kepatuhan hukum prajurit.

Analisis kerja sama lintas sektoral yang dilakukan antara Badan Pembinaan Hukum TNI dengan lembaga hukum dan stakeholders internal TNI lainnya

Kerjasama lintas sektoral antara Badan Pembinaan Hukum TNI (Babinkum TNI) dengan lembaga hukum dan stakeholders internal TNI lainnya merupakan langkah strategis dalam meningkatkan profesionalisme prajurit. Kerja sama ini penting karena memperkuat kemampuan hukum prajurit dan menciptakan sinergi antara komponen militer dan non-militer dalam menghadapi tantangan hukum yang semakin kompleks (Wiratama, 2015). Kerjasama lintas sektoral antara Badan Pembinaan Hukum TNI (Babinkum TNI) dengan lembaga hukum dan stakeholders internal TNI lainnya mengungkapkan bahwa kolaborasi ini membantu memperkuat pemahaman hukum, disiplin, dan akuntabilitas prajurit, meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi. Dengan pendekatan yang lebih terintegrasi, koordinasi yang lebih baik, dan dukungan yang memadai, kerja sama ini dapat lebih efektif dalam mendukung tujuan profesionalisme TNI.

KESIMPULAN

Badan Pembinaan Hukum TNI (Babinkum TNI) telah melakukan berbagai upaya yang terstruktur dan berfokus pada penegakan hukum, pendidikan hukum, serta pembinaan etika militer. dalam rangka meningkatkan profesionalisme prajurit. Upaya yang dilakukan oleh Babinkum TNI ini dirancang untuk memperkuat kedisiplinan, pemahaman hukum, dan moralitas prajurit, yang pada akhirnya akan meningkatkan profesionalisme mereka dalam menjalankan tugas pertahanan dan keamanan negara. Namun demikian masih terdapat tantangan khususnya pada ketersediaan sumber daya (SDM dan anggaran), perubahan peraturan dan kebijakan dan masih terdapat kelemahan pada kesadaran dan pengetahuan hukum prajurit.

Kerja sama lintas sektoral antara Badan Pembinaan Hukum TNI (Babinkum TNI) dengan lembaga hukum dan stakeholders internal TNI lainnya telah dibuktikan memainkan peran penting dalam meningkatkan profesionalisme prajurit. Kolaborasi tersebut dapat direpresentasikan dengan prajurit yang memahami dan menerapkan aturan hukum dengan baik, disiplin, serta bertindak secara etis dalam menjalankan tugasnya. Namun demikian kerjasama yang sudah terjalin perlu diperluas seperti LSM atau akademisi untuk mendapatkan perspektif tambahan dan memperkaya materi hukum yang lebih luas.

BIBLIOGRAFI

- Assagaf, Sayyid Muhammad Uwais Fathonah. (2023). *Sistem klasifikasi berita kriminal menggunakan metode naive bayes classifier*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Danardono, Donny. (2015). *Critical Legal Studies: Posisi Teori dan Kritik*. *Kisi Hukum*, 14(1), 1–6.
- Deflijun, Defi. (2020). *Analisis Kebijakan Peraturan Kasad No 43 Tahun 2016 Tentang*

Analisis Pembinaan Hukum Bagi Prajurit Melalui Pemberdayaan Badan Pembinaan Hukum Tni Dalam Rangka Meningkatkan Profesionalisme Prajurit

- Organisasi Pembinaan Mental Kodam (Orgas Bintaldam) Dalam Pembinaan Mental Meningkatkan Profesionalisme Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Studi Pada Makodam I/BB)*. Universitas Medan Area.
- Diantha, I. Made Pasek, & Sh, M. S. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media.
- Hutomo, Priyo, & Soge, Markus Marselinus. (2021). Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer. *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 1(1), 46–68.
- Ismiyati, Anna Anica. (2019). Pengaruh kompetensi, independensi, dan akuntabilitas terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi (studi empiris pada kantor akuntan publik di Provinsi Banten). *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 4(1), 89–101.
- Lubis, Arief Fahmi. (2022). *Strategi Dalam Penyelenggaraan Dukungan Hukum Bagi Tni Ad Pada Operasi Militer Selain Perang (Kesiapan Perwira Hukum Tni Ad Dalam Doktrin Hukum Operasional)*. Penerbit Qiara Media.
- Moleong, Lexy J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif (Revisi). *Bandung: PT Remaja Rosdakarya*, 102–107.
- Rahayu, Suri Margi, & Utama, Utama. (2016). Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Varidika*, 27(2), 123–129.
- Ramadantica, Indi. (2024). Implementasi Kebijakan Netralitas TNI Dalam Berpolitik Sebagai Unsur Lembaga Pertahanan Di Pusdiklatkopassus. *Community Empowerment: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), 44–53.
- Ramadhan, Indra, & Heniarti, Dini Dewi. (2022). Pertanggungjawaban Hukum Pidana terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Insurbordinasi Dihubungkan dengan Displin Militer. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(2), 1232–1235.
- Sarjito, Aris, & Lelyana, Nora. (2023). Analisis Dampak Persepsi Ancaman Drone Terhadap Pembuatan Kebijakan Pertahanan Dan Proses Alokasi Sumber Daya. *Jurnal of Management and Social Sciences*, 1(4), 14–32.
- Satibi, Ahmad. (2024). *Upaya Meningkatkan Pembinaan Mental Rohani Islam Dalam Pelaksanaan Tugas Prajurit Di Denintel Kodam Iskandar Muda*. UIN Ar-Raniry Pascasarjana S2 Ilmu Agama Islam.
- Uksan, Arifuddin. (2017). *Pendidikan Karakter TNI Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi: Studi Kasus Pusat Pembinaan Mental TNI*.
- Wiratama, Heru. (2015). *Kewenangan TNI AL Selaku Penyidik Tindak Pidana Dilaut Dalam Mengamankan Perairan Indonesia*. Brawijaya University.

Copyright holder:

Jajang Kurniawan, M. Ali Ridho, Rokhmat (2024)

First publication right:

[Syntax Idea](#)

This article is licensed under:

